**PENGUATAN EKONOMI KEBUDAYAAN DIY BERBASIS ANGGARAN KEUANGAN DANAIS1 2**

**Sri Suryaningsum**

Dosen FE UPNVY

suryaningsumsri@yahoo.com, 085729671807

**Moch. Irhas Effendy**

Dosen FE UPNVY,

m\_irhaseffendi@upnyk.ac.id, 0811268639

**Raden Hendry Gusaptono**

Dosen FE UPNVY

tono\_hendri@yahoo.com, 08122717294

**Sultan**

Dosen FE UPNVY

sultantriria@yahoo.co.id, 08121553430

**ABSTRACT**

*DIY is an unique and beauty province. Unique, because of its loaded cultures which are material culture, nonmaterial culture (such as legend, folktales, traditional song and dance which behaves and effloresces in society). Beautifull, because Yogyakarta have an extraordinary nature enchantment, such as beach, mountain range, cave, river, palace, temples, Selokan Mataram, and other historical sites which spreads in there. Yogyakarta’s slogan is “Never Ending Asia” and it’s worthy for this province, but in reality it’s need a proper manage arrangement for Yogyakarta’s cultural world.*

*Utilizing one hundred percent of Danais financial estimate should be done if the cultural mapping is proper, that is to say the cultural purpose ought to widespread, cultural potential ought to deep explore, supported by qualified human resources, and information resources in right way.*

***Keyword:*** *DIY, cultural,**financial estimate, Danais*

**1. PENDAHULUAN**

Memperkokoh ekonomi berbasis kebudayaan perlu dilakukan. Pasar bebas sebentar lagi dihadapi. Ekonomi berbasis kebudayaanlah yang merupakan salah satu keunggulan Yogyakarta. Tidak ada yang bisa menandingi ataupun menyamai kebudayaan Yogykarta, karena ciri khas dan keunikan DIY

hanya ada di Yogyakarta itu sendiri. **Kebudayaan**

**yang berbasis multikultur akan meningkatkan kesejahteraan batin masyarakat**. Kebudayaanyang unik dan multikultur akan memperbesar peluang potensi ekonomi. Potensi ekonomi inilah yang akan ditangkap dunia pariwisata sebagai teknis industrinya. Pada giliran objek pariwisata

1. Bagian dari hasil penelitian yang dibiayai oleh DIKTI RI, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2014: PENGENTASAN KEMISKINAN
2. Peneliti menghaturkan terima kasih mendalam kepada DIKTI RI dan LPPM UPNVY.

**39**

**40** *Seminar Nasional dan Call For Paper SiNAU 3*

di DIY menjadi **potensi ekonomi yang akan** **membawa kesejahteraan lahir** bagi masyarakatDIY khususnya akibat banyaknya wisatawan dalam/luar negeri yang datang ke Yogyakarta. Manfaat multiplyier effect inilah yang akan dinikmati masyarakat Yogyakarta, dan pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup dan berpotensi membuka lebar dinikmatinya kue ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Potensi inilah yang sesungguhnya akan mengentaskan kemiskinanan di DIY.

Slogan, Yogyakarta never ending Asia memang pantas disandang DIY dan Amemayu Hayuning Bawana (mengalir bersama hembusan alam). Pembenahan kebudayaan yang berbasis multikultur akan memperbesar potensi pariwisata di DIY. Objek pariwisata di DIY terdiri dari wisata alam, wisata belanja, wisata budaya, dan wisata keagamaan. Walaupun mengkategorian ini tidak bisa memisahkan satu kategori dengan kategori yang lainnya, namun kita mengenal Kaliurang dan pantai Parangtritis sebagai wisata alam. Potensi wisata alam di DIY sangat luar biasa, namun memerlukan tata kelola yang tepat, baik infrastruktur prasarana dan sarana pariwisatanya. Wisata belanja adalah daerah Malioboro. Wisata budaya adalah sendratari Ramayana dan grebek. Wisata keagamaan kita mengenal Prambanan, dan lain sebagainya. Pariwisata DIY lebih dari objek-objek pariwisata yang masyarakat kenal selama ini. Banyak situs yang tersebar di DIY yang belum tergarap dengan baik, misalnya pengembangan wisata berbasis geoheritage pantai, geoheritage sungai, geoheriage goa, geoheritage alam, geoheritage megalitus, dan lain sebagainya. Di sisi lain banyak situs bersejarah yang dimiliki oleh pribadi dan hancur karena projek. Situs-situs ini juga perlu digarap dengan baik. Potensi wisata DIY sangat luar biasa dan masih perlu tata kelola yang baik agar masyarakat DIY, wisatawan dalam dan luar Indonesia semakin mengenal DIY sebagai Yogyakarta never ending Asia.

Tata kelola budaya dan pariwisata ini tidak mungkin terlaksana dari perjuangan pribadi dan organisasi-organisasi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban melindungi multikultur yang sudah berkembang selama ini di DIY. Pemerintah memiliki tanggungjawab dan rasa memiliki

(handarbeni) untuk mengatur masalah kebudayaan dan pariwisata, termasuk pendanaannya. Pendanaan ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan urusan keistimewaan DIY di lima bidang, yaitu bidnag kebudayaan, pertanahan, tata ruang, tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY, serta kelembagaan pemerintah DIY. Masalah penyerapan dana ini selama tahun 2013 dan awal tahun 2014 selalu terbentur kurang optimalnya penyerapan.

Dana Keistimewaan sangat diperlukan DIY dalam tata kelola budaya dan pariwisata. DIY adalah gudang budaya dan gudang pariwisata. Lingkup budaya dan pariwisata yang luas ini harus dipahami oleh semua pelaku budaya, pelaku pariwisata, dan masyarakat DIY. Pemetaan ruang lingkup budaya dan pariwisata ini akan sangat membantu dalam penyerapan dana anggaran keistimewaan. Penyerapan dana keistimewaan yang tepat pada gilirannya akan membawa multiplayer effect yang luar biasa, yang pada gilirannya mampu memperkokoh perekonomian DIY. Memperkokoh perekonomian DIY berarti mengentaskan kemiskinan.

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

**Anggaran Untuk Pengembangan Budaya**

Saat ini Keistimewaan DIY diatur dengan UU Nomor 13 tahun 2012 yang meliputi:

1. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. kebudayaan;
4. pertanahan; dan
5. tata ruang.

**Kewenangan istimewa ini terletak di tingkatan Provinsi**

Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efi siensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas,

*Memperkokoh Perekonomian Bangsa dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Seminar Nasional dan Call For Paper SiNAU* **41** |
| transparansi, | dan | partisipasi | dengan | Anggaran 2013 tahap II disampaikan paling lambat |
| memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan | pada 2 Desember 2013. |
| asli yang selanjutnya diatur dalam Perdais. |  |  | Untuk tahun 2013, Danais pada tahun 2013, |
|  | Kewenangan | kebudayaan | diselenggarakan | berdasarkan Menteri Keuangan M. Chatib Basri |
| untuk memelihara dan mengembangkan hasil | melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/ |
| cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, | PMK.07/2013 tertanggal 17 Oktober 2013, telah |
| pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, | menetapkan Alokasi Dana Keistimewaan Daerah |
| dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat | Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2013. |
| DIY yang selanjutnya diatur dalam Perdais. |  | Pasal 1 PP itu menyebutkan, Dana Keistimewaan |
|  | Dalam | penyelenggaraan | kewenangan | Yogyakarta Tahun Anggaran yang berasal dari |
| pertanahan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten | Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara |
| Pakualamanan dinyatakan sebagai badan hukum. | adalah sebesar Rp 231.391.653.500,00 (dua ratus |
| Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola | tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh |
| dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah | dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus |
| Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya | rupiah). Dana Keistimewaan itu dialokasikan pada |
| pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, | bidang-bidang yang merupakan kewenangan |
| dan | kesejahteraan | masyarakat. | Kewenangan | keistimewaan DIY, dengan rincian: |
| Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang | a. | Bidang Kebudayaan sebesar Rp 212,546 |
| terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah |  | miliar; |
| Kasultanan dan tanah Kadipaten yang selanjutnya | b. | Bidang Pertanahan sebesar Rp 6,3 miliar; |
| diatur dalam Perdais. Perdais adalah peraturan | c. | Bidang Kelembagaan Pemerintah Daerah |
| daerah istimewa yang dibentuk oleh DPRD DIY |  | sebesar Rp 2,516 miliar; dan |
| dan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan | d. Bidang Tata Ruang sebesar Rp 10,030 miliar. |
| Kewenangan Istimewa. Selain itu, pemerintah |  |  |
| menyediakan | pendanaan | dalam | rangka |  | Menjelang tutup tahun 2013, dana |
| penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam | keistimewaan Yogyakarta yang diterima satuan |
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai | kerja perangkat daerah SKPD baru Rp 32,6 |
| dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan | miliar atau 14,1 persen dari total dana termin |
| negara. Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, | pertama 2013 sebesar Rp 115 miliar. Yang berarti, |
| penyaluran Dana Keistimewaan DIY Tahun | dana Rp 32,6 miliar yang diterima SKPD harus |
| Anggaran 2013 dilakukan secara bertahap sesuai | direalisasikan. |
| dengan laporan pencapaian kinerja dengan rincian: |  | Batas waktu penggunaan pada 31 Desember, |
| a. Tahap I disalurkan sebesar 50% dari alokasi | dan | laporan penggunaan pada 10 Januari |
|  | Dana Keistimewaan; |  |  |  | tahun depan. Kegiatan yang belum selesai akan |
| b. | Tahap | II disalurkan sebesar 50% dari | dilanjutkan pada 2014. Untuk program yang penting, |
|  | alokasi Dana Keistimewaan setelah Laporan | maka akan diselesaikan secara utuh. Pencairan |
|  | Pencapaian Kinerja tahap I mencapai minimal | dana keistimewaan 2013 termin II juga dilakukan |
|  | 80%. |  |  |  |  |  |  | pada 2014. Total dana keistimewaan 2013 sebesar |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rp 231 miliar. Anggaran Danais tahun 2014, Tahun |
|  | “PenyaluranDanaKeistimewaanDIYdilakukan | 2014 DIY mendapat alokasi dana keistimewaan Rp |
| berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran Dana | 523 miliar. Pencairan anggaran itu dibagi dalam |
| Keistimewaan yang disampaikan oleh Gubernur | tiga tahap, yakni sebesar 25 persen, 55 persen, dan |
| DIY atau pejabat yang diberi kuasa kepada Kuasa | 20 persen. Dana yang turun pada tahap pertama |
| Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan,” bunyi | sekitar Rp 130 milar. |
| Pasal 6 Ayat 1 PMK tertanggal 17 Oktober 2013 |  | Pelaksanaan pencairan sampai dengan Rabu, |
| itu. Ditegaskan dalam PMK itu, Surat Permintaan | 23 April 2014, dana keistimewaan belum cair. Hal ini |
| Penyaluran | Dana | Keistimewaan | DIY | Tahun | disebabkan karena belum terpemenuhinya syarat |

*Memperkokoh Perekonomian Bangsa dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik*

**42** *Seminar Nasional dan Call For Paper SiNAU 3*

kelengkapan administrasi tentang penggunaannya. Syarat kelengkapan administrasi ini meliputi laporan pertanggungjawaban dana keistimewaan sebelumnya oleh pemerintah DIY.Dalam hal upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DIY sudah sangat tepat, yaitu akan menalangi program usulan daerah yang memakai dana keistimewaan itu sesuai nominal yang sudah diajukan. Alasannya adalah agar programnya tidak macet. Akibat kondisi ini, pemerintah DIY tak berharap dana yang ada akan terserap seratus persen. Target yang ditetapkan tiap termin yang disalurkan bisa terserap minimal 70 persen.

Suasana terlambatnya penyaluran ini pada masing-masing kabupaten di DIY yang terdiri dari Sleman, Bantul, Yogyakarta, Kulonprogo, dan Gunungkidul disikapi dengan menunggu. Sikap ini diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kabupaten Gunungkidul Syarif Armunanto mengakui adanya kekacauan penyaluran danais ini dan dinyatakan bahwa sikapnya adalah menunggu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Terlambatnya penyaluran dana keistimewaan itu jelas mempengaruhi pelaksanaan program yang sudah diusulkan pemerintah Gunungkidul tahun 2014. Di Gunungkidul, program untuk bidang pariwisata dan kebudayaan mendapatkan porsi yang terbesar tapi sampai 21 April 2014 belum ada yang terlaksana.

Dana tahap pertama yang seharusnya cair pada januari 2014 baru cair pada April 2014. Tahun ini, alokasi dana keistimewaan sebesar Rp523 milyar. Dana itu akan dicairkan secara bertahap. Tahap pertama sebesar 25% dari total dana atau Rp130milyar, tahap kedua sebesar 55% atau Rp288milyar, dan tahap ketiga sesar 20% atau Rp104 milyar. Awal Juli 2014, penyerapan dana tahap pertama yang cair pada April 2014 baru sebesar Rp27 milyar atau sekitar 20,8%. Padahal, untuk mencairkan dana keistimewaan tahap kedua yang diagendakan pada Juli 2014, Pemprov DIY harus mampu menyerapo dana tahap pertama sebesar 80%.

**Budaya**

Kebudayaan bukan hanya kesenian. Dimensi kesenian hanya merupakan salah satu dari

banyaknya dimensi budaya. Kebudayaan mencakup banyak dimensi yang ada dan tumbuh di tatanan masyarakat. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah *Cultural-Determinism*. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Berdasarkan wujudnya tersebut, budaya memiliki beberapa elemen atau komponen, menurut ahli antropologi Cateora, yaitu **kebudayaan material** **(**kebudayaan material mengacu pada semuaciptaan masyarakat yang nyata, konkret, termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi, mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, lapangan keraton, rumah, benteng, gedung, kain, corak kain dan pakaian, dan seterusnya.**),** **kebudayaan nonmaterial** (dongeng, cerita rakyat,dan lagu atau tarian tradisional), **lembaga sosial**, **sistem kepercayaan**, **bahasa, estetika** (seni dankesenian, musik, cerita, dongeng, hikayat, drama dan tari–tarian, yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat).

Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial,norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Melville J. Herskovits, Bronislaw Malinowski, Bronislaw Malinowski, C. Kluckhohn, dan juga Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi. Dalam konteks ini tidak lepas dari pariwisata.Pariwisata di Yogyakarata merupakan sektor ekonomi penting. Pariwisata di Yogyakarta saling berkait dengan

*Memperkokoh Perekonomian Bangsa dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik*

*Seminar Nasional dan Call For Paper SiNAU* **43**

kebudayaan. Yogyakarta sendiri ditetapkan sebagai kota dengan ciri khas pembangunan pariwisata sesuai dengan master plan MP3EI. Porsi kue ekonomi pariwisata yang didapat Yogyakarta adalah sebanding dengan pariwisata secara nasional. Secara nasional, pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit.

* 1. **ANALISIS DATA**
1. Penyerapan dana keistimewaan tahap pertama rendah karena kemampuan SKPD untuk mengelola dana dalam jumlah besar masih rendah. Sebelum dana keistimewaan DIY dianggarkan, SKPD di DIY hanya mengelola dana dengan jumlah yang tidak terlalu besar.
2. Ketidakmampuan mengelola dana berjumlah besar itu terutama karena jumlah dan kapasitas sumber daya manusaia di SKPD kurang. Pemprov DIY berencana mengubah struktur organisasi di SKPD, terutama yang mengurusi masalah kebudayaan. Hal itu karena alokasi terbesar dana keistimewaan adalah untuk bidang kebudayaan. Dari total dana keistimewaan DIY tahun ini sebesar Rp523 milyar, sebanyak Rp375 milyar dialokasikan untuk bidang kebudayaan. Karena besarnya lingkup budaya, maka perlu reorganisasi di dinas kebudayaan dengan menambah jumlah bidang. Di tingkat kabupaten/kota, perlu dibentuk dinas kebudayaan yang terpisah dengan dinas pariwisata. Jika hal ini dilakukan, maka perubahan organisasi ini akan diajukan ke DPRD DIY periode yang baru. Jadi, mungkin baru bisa selesai tahun depan.
3. Pkepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan, dan Aset DIY, lambatnya penyerapan dana keistimewaan tahap perta,a juga disebabkan keterlambatan pencairan dana. Dana tahap pertama yang seharusnya cair pada januari 2014 baru cair pada April 2014. Tashun ini, alokasi dana keistimewaan sebesar Rp523 milyar. Dana itu akan dicairkan

secara bertahap. Tahap pertama sebesar 25% dari total dana atau Rp130milyar, tahap kedua sebesar 55% atau Rp288milyar, dan tahap ketiga sesar 20% atau Rp104 milyar.

1. Awal Juli 2014, penyerapan dana tahap pertama yang cair pada April 2014 baru sebesar Rp27 milyar atau sekitar 20,8%. Padahal, untuk mencairkan dana keistimewaan tahap kedua yang diagendakan pada Juli 2014, Pemprov DIY harus mampu menyerapo dana tahap pertama sebesar 80%.
2. Perlu perubahan satuan kerja perangkt daerah/SKPD agar dana sebesar itu bisa terserap semua.

**4. SIMPULAN & SARAN**

DIY adalah gudang budaya. Lingkup budaya yang luas ini harus dipahami oleh semua pelaku budaya dan masyarakat. Pemetaan ruang dan lingkup budaya ini akan sangat membantu dalam penyerapan dana anggaran keistimewaan. Penyerapan dana keistimewaan yang tepat pada gilirannya akan membawa multiplayer effect yang luar biasa, yang pada gilirannya mampu memperkokoh perekonomian DIY. Memperkokoh perekonomian DIY berarti mengentaskan kemiskinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Effendi, M.Irhas. 2006. Perumusan Strategi Pembangunan Desa Model di Daerah Tertinggal (Fasilitator dan Anggota Perumus) Kabupaten Tertinggal di Indoensia Baik yang digunakan sebagai kerangka pengembangan desa model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal dalam rangka Rencana Aksi Nasional Kemeneg. Laporan penelitian Kemeneg.

Effendi, M.Irhas. 2011. Model pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kulon Progo DIY ADB melalui Disnakersos KB Kabupaten Sleman PDT. Laporan penelitian Disnakersos KB Kabupaten Sleman

*Memperkokoh Perekonomian Bangsa dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik*

**44** *Seminar Nasional dan Call For Paper SiNAU 3*

Effendi, M.Irhas. 2009. PDT (Penanggungjawab merangkap Anggota) Baik digunakan sebagai **Pelaksanaan Program** PengentasanKemiskinan melalui implementasi TTG pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE**).** Laporan penelitian Laporan penelitian Kemeneg.

Gusaptono, Hendri. 2010. Penyebab Kemiskinan dan Karakteristik Daerah. Projek Penelitian.

Gusaptono, Hendri. 2012. Arah Pengentasan Kemiskinan di DIY. Draf Artikel Publikasi. Jurnal Buletin Ekonomi. FE UPNVY.

Kedaulatan Rakyat. Januari 2013 sd 20 Juli 2014.

Yogyakarta.

Mardiasmo (1999), *The Impact of Central and* *Provincial Government Intervention on Local Government Budgetary Management: The Case of Indonesia*, Ph.D Thesis (Unpublished).

Republik Indonesia (1999), Undang-undang No. 22 Tahun 1999.

Republik Indonesia (1999), Undang-undang No. 25 Tahun 1999.

Shah, Anwar and Others, (1994), *Intergovernmental* *Fiscal Relations in Indonesia*, World BankDiscussion Paper No 239, Washington, DC:

World Bank.

Shah, Anwar (1997), *Balance,* *Accountability,*

*and* *Responsiveness:* *Lesson* *about*

*Decentralization*, Washington, DC: World

Bank.

Sultan. 2010. Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY – Jawa Tengah serta Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Periode (2000-2004). Projek Penelitian.

Suryaningsum, Sri. 2005a. Pengaruh Pendidikan

Dan Dunia Kerja Terhadap Terhadap

Kecerdasan Emosional (Studi Empiris Di

Bantul, Sleman, Dan Kota Jogjakarta). Jurnal

Riset Daerah Bantul Volume IV, Desember

2004 ISSN: 1412-9519

Suryaningsum, Sri. 2005b. Pengaruh Pendidikan Tinggi Akuntansi Terhadap Kecerdasan Emosional (Penulis sendiri). Jurnal EKONOM ISSN: 0853-2435, terakreditasi no: 34/ DIKTI/ Kep/ 2003 Volume IX, nomor: 1, medan maret 2005

Suryaningsum, Sri. 2008b. The Application of

Corporate Governance on Company’s

Performance (Penulis I). Wimaya (jurnal

Ilmiah UPN Veteran Yogyakarta NO. 41 Tahun

XXV, Januari.

Syari’udin, Akhmad. Gusaptono, Hendri. Listya

Endang Artiani.September, 2011**.** Efektivitas

Program Pengentasan Kemiskinan(Studi

Kasus Di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta). Laporan Penelitian

Unggulan Perguruan Tinggi. DIKTI RI.

World Bank (1997), *World Development Report* *1997-The State in a Changing World*,Washington, DC: World Bank.

Wikipedia. Kebudayaan.